



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Keran ekspor batu bara dibuka lagi
Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

E PAPER.MEDIAINDONESIA.COM

NO. 14740/ TAHUN KE-52 | RABU, 12 h.2 JANUARI 2022,

Keran Eksport Batu Bara Dibuka Lagi

Untuk menjamin pasokan batu bara ke PLN, pemerintah bakal membentuk badan layanan umum.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

PEMERINTAH kembali membuka keran ekspor batu bara yang sempat ditutup sejak 1 Januari lalu. Ekspor dibuka lagi setelah suplai batu bara ke PT PLN (persero) aman.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, kemarin, keran ekspor batu bara sudah bisa dibuka secara bertahap mulai hari ini. "Per (10/1), 14 kapal yang sudah bermuatan penuh batu bara dan sudah dibayar oleh pembeli agar segera di-release untuk bisa ekspor," ungkapnya dalam keterangan resmi.

Jumlah kapal tersebut harus diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga perlu dilibatkan dalam pengawasan supaya tidak ada kapal yang keluar di luar *list* yang sudah diverifikasi.

Kendati begitu, kata Luhut, kapal tongkang yang memuat batu bara untuk ekspor terap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri yang masih membutuhkan suplai. "Jadi, belum diperbolehkan untuk melakukannya ekspor."

Luhut menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan HoP (hari operasi) PLTU PT PLN dan Independent Power Producer pada Januari 2022 diperlukan pasokan batu bara 16,2 juta metrik ton (MT). Kekurangan pasokan 2,1 juta MT yang dilaporkan sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Dirjen Minerba pada 9 Januari dan akan diselesaikan paling lambat kemarin.

Untuk menjamin pasokan batu bara ke PLN, pemerintah bakal membentuk badan layanan umum (BLU). Kontrak suplai batu bara ke PLN pun akan menggunakan term CIF (*cost, insurance, freight*) atau pembelian

batu bara dengan harga sampai di tempat. Dengan kata lain, tidak menerapkan skema *free on board* (FoB) atau membeli batu bara di lokasi tambang.

"Nanti bayar ke PLN dan membeli secara *marketplace*. Pengaturan logistik dan pengiriman menjadikan tanggung jawab *supplier* batu bara. Pembentukan BLU akan dirampungkan dalam waktu satu hingga dua bulan depan," jelas Luhut.

Dampak positif

PT PLN menyatakan intervensi pemerintah soal larangan ekspor telah memberikan dampak positif terhadap pasokan batu bara ke pembangkit perusahaan negara itu. Hingga kini, PLN mendapatkan komitmen pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik.

Menurut Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PT PLN Agung Murdi, kebutuhan batu bara untuk mencapai HoP ideal minimal 20 hari berkisar 16 juta sampai 20 juta MT. PLN pun akan mengawasi kebutuhan batu bara dari sisi kargo atau volume batu bara masuk dari sisi armada (*vessel tonnage*) selama pemenuhan *day per day*.

Selain itu, Agung menyebut kebutuhan armada angkut untuk memenuhi HoP minimal 20 hari sampai dengan akhir Januari 2022 sebanyak 130 *vessel shipment* dan 711 tongkang *shipment* mulai terpenuhi secara bertahap.

PLN juga memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keandalan pasokan ini dapat terus terjaga selama suplai batu bara terpenuhi.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi berpendapat pemerintah seharusnya melanjutkan larangan ekspor batu bara yang diberlakukan karena tidak terpenuhinya DMO (*domestic market obligation*). Pengusaha dipaksa memasok batu bara ke PLN sebesar 25% dari total produksi per tahun dengan harga US\$70 per metrik ton.

Fahmy mengatakan, memang ada denda bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan itu, tetapi sangat kecil. "Karena itu, pada saat harga batu bara membumbung, pengusaha memilih membayar denda untuk mendahulukan ekspor ketimbang memasok ke PLN," tandas Fahmy. (X-8)